

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menciptakan Masyarakat Madani adalah hal penting di Indonesia, karena Masyarakat Madani merupakan cita-cita bersama bangsa dan negara yang sadar akan pentingnya suatu keterikatan antar komponen pendukungnya dalam terciptanya bangsa dan Negara yang maju dan mandiri. Masyarakat Madani dalam mewujudkan cita-cita tersebut, sejatinya sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup sebagai tonggak pembangunan berkelanjutan yang menyejahterakan kehidupan antar generasi, disamping upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing, dan kesiapan menghadapi kecenderungan globalisasi.

Menurut Agus Dwiyanto (Taufik Abdullah dkk, 1999: 9) masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri dan bebas dari intervensi pemerintah. Konsep Masyarakat Madani disamping kemandirian, sebagaimana dijelaskan dalam banyak literatur yang ada, juga mencirikan dirinya dengan pluralisme, dimana berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda bisa bekerjasama dan hidup bersama secara damai.

Karakteristik masyarakat madani menurut Sujanti (2007: 214) adalah sebagai berikut: (1) diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan

mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, serta merupakan sumber motivator terwujudnya kreativitas, yang tercantum keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta manakala manusia memiliki sikap inklusif, dan mempunyai kemampuan (*ability*) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar, namun dengan catatan, identitas sejati atas parameter-parameter otentik agama tetap terjaga.

(2) tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar, serta menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shahib (Sujanti, 2007: 214) menyatakan bahwa tujuan agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup berdampingan, dan saling menghormati satu sama lain.

(3) tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi adalah suatu pilihan untuk bersama-sama membangun, dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Namun untuk menuju Masyarakat Madani masih terdapat beberapa kendala diantaranya: (1) masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yaitu kurang peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia, (2) masih rendahnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun

beragama, (3) masih rendahnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, (4) kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata, (5) masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, (6) kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter, (7) tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja terbatas, (8) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar, (9) kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.

Rendahny sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama disebabkan adanya pluralitas (kemajemukan). Pluralitas (kemajemukan) merupakan suatu gejala sosial yang umum ditemui disetiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara kepulauan, sejak awal sudah mentasbihkan diri sebagai bangsa yang multi ras, multi etnik, multi agama, dan multi kebudayaan.

Kemajemukan atau pluralitas masyarakat Indonesia, menurut Retno Andriati (Ilham Nur Afian 2007: 2), dapat dilihat secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal, masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menurut agama, ras, etnis, budaya, dan lokalitas. Secara vertikal, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah.

Indonesia merupakan salah satu negara pluralis terbesar di dunia. Kebenaran pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Berdasarkan sensus penduduk 2010

jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa, dengan jumlah laki-laki 119.630.913 jiwa, sedangkan perempuan sebesar 118.010.413 jiwa. Sekitar 85,1% pemeluk agama Islam, 9,2% pemeluk agama Protestan, 3,5% pemeluk agama Katolik, 1,8% pemeluk agama Hindu, dan 0,4% pemeluk agama Buddha.

Kemajemukan (pluralitas) diakui atau tidak dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan, dan hilangnya rasa manusia untuk menghormati hak-hak orang lain adalah bentuk negatif yang nyata dan sebagai bagian dari pluralisme.

Banyak contoh kekerasan yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu yang berujung pada penyerangan, perusakan, pembakaran, penangkapan hingga intimidasi terhadap seseorang atau kelompok-kelompok tertentu seperti:

Pertama, konflik bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) antara kelompok Syiah dengan kelompok lainnya di dua desa di Kabupaten Sampang, sempat meletup pada tanggal 29 Desember 2011. Sebanyak 351 warga dari kelompok Syiah terpaksa harus diungsikan karena diancam akan dibunuh, setelah sebelumnya kelompok penyerang melakukan pembakaran madrasah, mushalla dan rumah pengikut Syiah dengan alasan karena beraliran sesat Suara Karya online (Rabu, 18 Januari 2012).

Ke dua, kisruh rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor. Kericuhan pecah ketika Lily berusaha untuk memperjuangkan hak-hak jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Jalan Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor. Upaya Lily tersebut ditentang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Pemerintah kota Bogor dengan alasan bangunan itu masih dalam status sengketa. Kisruh rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) ini masuk dalam laporan dunia “*Human Rights Watch Report 2012, Events of 2011*” di halaman 337 alinea kedua dan ketiga. Laporan itu baru saja dikeluarkan dan disebarluaskan secara mendunia oleh Human Rights Watch. Perwakilan Human Rights Watch di Indonesia, Andreas Harsono, mengungkapkan, konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin itu bisa masuk dalam catatan dunia karena dinilai ada permasalahan hukum dan pelanggaran hak kebebasan beribadah di sana www.tempo.co/jakarta (Selasa, 24 Januari 2012).

Ke tiga, kisruh Teluk Sirih di Kejati Sumatera Barat, masalah berawal dari masyarakat yang belum mendapatkan silih jariah dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sebab, silih jariah yang harus diterima masyarakat dari rekening Kerapatan Adat Nagari (KAN) disita oleh Kejati www.sindikasi.inilah.com (Kamis, 2 februari 2012).

Kejadian ini menjadi semakin meresahkan, ketika aparat keamanan yang mestinya menjaga ketertiban, justru membiarkan dan bahkan terkesan memberikan dukungan terhadap berbagai tindakan destruktif tersebut. Hal lain yang membuat miris hati masyarakat Indonesia adalah, peristiwa kekerasan

seperti diatas cenderung semakin meningkat. Termasuk dalam praktik dunia pendidikan kita. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan atau pembelajaran di sekolah selama ini tidak ubahnya sebagai pabrik intelektualan sich, namun dangkal dan kering akan perikemanusiaannya. Padahal di Indonesia sejak Sekolah Dasar (SD) telah diberikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang banyak bukti nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan Kewarganegaran dalam konteks pendidikan bukanlah hal baru di Indonesia. Beragam model serta nama pendidikan kewarganegaraan yang mengemban misi pendidikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah banyak dilakukan pemerintah. Mata pelajaran ini muncul pertama kali tahun 1957 dengan nama “Kewarganegaraan”, yang isinya terbatas hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara memperoleh serta kehilangan status kewarganegaraan.

Munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran *civic* versi Orde Lama hampir seluruhnya dibuang karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul dengan nama “Kewargaan Negara”, yang isinya disamping Pancasila dan UUD 1945, adalah ketetapan-ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Hak Asasi Manusia (HAM), serta beberapa materi yang berasppek sejarah, geografi, dan ekonomi. Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No.IV/MP/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada kurikulum 1975.

Ditetapkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. II/MPR/1978 tentang P-4, terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi mata pelajaran ini, yakni sangat dominan materi P-4 melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya kurikulum 1984 maupun kurikulum 1994, dimana “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP) telah berubah nama menjadi “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn). Menurut perkembangan terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam kurikulum suplemen 1999 karena ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tersebut telah dicabut dengan ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998.

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga sedang dalam proses reformasi kearah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan paradigma baru (*New Indonesian Civic Education*). Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, sampai restrukturasi isi kurikulum dan materi pembelajaran.

Kurikulum 2004 (Isnandar 2010: 6) menyatakan pendidikan kewarganegaraan (*citizenhip*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Sunarso dkk (2008: 1) Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “

value-based education “. Konfigurasi atau kerangka sistematis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut :

Pertama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua* Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga* Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara pragmatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, serta moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation* dan *character building*) serta pemberdayaan warga negara. Misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) lebih khas yaitu, mata pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara

persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat dan lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan.

Menurut Pusat Kurikulum (Sunarso, dkk 2008: 11) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah memberikan kompetensi sebagai berikut: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. (2) berpartisipasi secara bermutu, bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. (4) berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*) yang ditandai dengan dimilikinya tiga kemampuan kewarganegaraan meliputi: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*).

Pengertian warga negara yang baik itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolusioner, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang

baik adalah warga negara yang pacasilais, manusia pembangunan dan sebagainya.

Upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, fungsi dan peranan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD) maka berdasarkan Standar Isi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (Bambang Soehendro, 2006: 108) ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) persatuan dan kesatuan bangsa, (2) norma, hukum dan peraturan, (3) hak asasi manusia, (4) kebutuhan warga negara, (5) konstitusi negara, (6) kekuasaan dan politik, (7) Pancasila, (8) globalisasi.

Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keterbukaan dan jaminan keadilan.

Norma, Hukum, dan peraturan meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

Hak Asasi Manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional serta internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.

Kebutuhan Warga Negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.

Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.

Politik dan Kekuasaan meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi serta sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

Pacasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, serta mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, lebih khusus lagi yang terjadi pada siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamanan I kelas VA yaitu sebagai berikut: (1) rendahnya menghargai perbedaan kemampuan, hal ini terbukti ketika di dalam kelas ada seorang murid dengan segala keberaniannya mencoba untuk bertanya kepada ibu gurunya. Pada setiap awal mengucapkan sebuah kata siswa tersebut mengalami kegagalan, keadaan tersebut menyebabkan sebagian besar teman-teman sekelasnya tertawa. Akibatnya, siswa tersebut

semakin gagap dan bingung ketika mengetahui teman-teman menertawakannya. (2) rendahnya sikap toleransi agama antar teman, hal tersebut terbukti ketika salah seorang siswa sedang menjalankan ibadah puasa teman yang tidak berpuasa justru mengejeknya, (3) rendahnya pemahaman terhadap ketidakadilan dan perbedaan status sosial, hal ini terbukti pada siswa yang dijauhi temannya karena ia bukan dari golongan anak orang kaya. (4) rendahnya kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia hal ini terbukti bahwa, banyak siswa malas mengikuti upacara bendera dengan alasan panas, lelah dan sebagainya, banyak siswa yang enggan belajar bahasa Jawa dan justru memilih belajar bahasa Inggris, (5) rendahnya menghargai gender seperti, anak laki-laki selalu menghina anak perempuan berdasarkan status gendernya seperti “dasar perempuan cerewet”. (6) rendahnya menghargai perbedaan umur, hal ini terbukti ketika beberapa siswa mengejek siswa A dengan sebutan “genther” karena selain postur tubuhnya yang paling tinggi di kelas umurnya juga paling tua di kelas. (7) rendahnya sikap inklusif, hal ini terbukti ketika diskusi kelompok seorang siswa yang kokoh mempertahankan pendapatnya dan menganggap pendapatnya yang paling benar.

Kejadian-kejadian tersebut mengidentifikasi bahwa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamanan I khususnya kelas VA telah mengalami pergeseran dari nilai-nilai luhurnya digantikannya dengan produk-produk egoisme diri yang semakin serakah, tidak adil dan hampa akan nilai-nilai filosofis. Hal ini menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam

lingkup Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamanan I khususnya kelas VA, betapa kentalnya prasangka antar kelompok dan betapa rendahnya sikap saling menghargai, menghormati dan pengertian antar kelompok. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diajarkan di sekolah.

Berdasarkan pengamatan peneliti rendahnya sikap toleransi, dan pluralitas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamanan I kelas VA disebabkan karena belum maksimalnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah yang semestinya mampu mendidik siswa dalam menghargai dan toleransi adanya suatu kemajemukan, selain itu juga disebabkan karena ketidakcocokan pendekatan pembelajaran dan kurang bervariasinya pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Oleh sebab itu peneliti mengemukakan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk mengajarkan sikap pluralitas (kemajemukan) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamanan I kelas VA yaitu pendekatan pembelajaran konstruktivistik.

Pendekatan pembelajaran konstruktivistik dirasa sangat cocok untuk membangun sikap pluralitas. Sebab, pembelajaran konstruktivistik merupakan pembelajaran yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberikan makna terhadap informasi dan peristiwa yang dialami Anita Woolfolk (Benny A. Pribadi 2009: 156).

Peristiwa belajar akan berlangsung lebih efektif jika siswa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari dan ada di lingkungan sekitar. Cruickshank (Benny A. Pribadi 2009: 157) bahwa siswa belajar dan

membangun pengetahuan mereka manakala mereka berupaya untuk memahami lingkungan yang ada disekitar mereka. Membawa siswa bersentuhan langsung dengan objek atau peristiwa yang sedang dipelajari akan memberikan kemungkinan untuk membangun pemahaman yang baik tentang objek atau peristiwa tersebut.

Proses belajar yang berlandaskan pada teori konstruktivistik dilakukan dengan memfasilitasi siswa agar memperoleh pengalaman belajar yang dapat digunakan untuk membangun makna terhadap pengetahuan yang sedang dipelajari.

Penelitian terhadap proses pembelajaran konstruktivistik dalam meningkatkan sikap pluralitas siswa Sekolah Dasar perlu dilakukan agar pemahaman terhadap sikap pluralitas pada siswa kelas VA Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamanan I dapat meningkat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka identifikasi masalah dari penelitian ini antara lain:

- 1). Siswa belum mampu menghargai pluralitas (kemajemukan).
- 2). Pendekatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran (PKn) yang digunakan guru dalam mengenalkan pluralitas (kemajemukan) kurang bervariasi.
- 3). Belum diterapkan pendekatan pembelajaran konstruktivistik pluralitas (kemajemukan) yang menyenangkan dan membuat siswa aktif.
- 4). Sikap toleransi terhadap pluralitas (kemajemukan) masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas maka masalah dalam penelitian ini dibatasi. Permasalahan yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini adalah rendahnya sikap pluralitas siswa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ bagaimana pendekatan pembelajaran konstruktivistik dapat meningkatkan sikap pluralitas pada siswa kelas VA Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamanan I?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap pluralitas melalui pembelajaran konstruktivistik pada siswa kelas VA Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamanan I.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam penggunaan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran sikap pluralitas siswa di kelas tinggi.

2. Manfaat Praktis

a. Perkembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, yaitu sebagai kajian yang berkaitan dengan penggunaan pendekatan pembelajaran

konstruktivistik untuk meningkatkan sikap pluralitas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar (SD).

b. Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia pendidikan nyata dan sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Pendidikan S1.

c. Guru

Membantu memberikan pemikiran bagi guru SD, khususnya guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagaimana mengajarkan sikap pluralitas pada siswa Sekolah Dasar (SD) di kelas tinggi.

d. Bagi Sekolah

Penelitian ini dilakukan sebagai tolak ukur dalam peningkatan dan perbaikan kualitas pembelajaran khususnya tentang sikap pluralitas.